

Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif

Andi Awwaliyah Wulandari, Syahrir Karim, Muhammad Natsir

Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif Yudi Latif terkait cendekiawan dan kekuasaan. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Yudi Latif mengenai cendekiawan dan kekuasaan serta mengetahui pandangannya tentang fenomena hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Jenis penelitian ini studi tokoh dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. Menurut Yudi Latif bahwa cendekiawan adalah sesuatu yang abstrak dapat dikatakan sebagai intelektual ataupun intelegensia. Sedangkan kekuasaan adalah suatu daya atau kekuatan yang diperlukan oleh manusia dan tidak ada kehidupan tanpa kekuasaan. Bentuk fenomenanya dalam cendekiawan dan kekuasaan mengalami kemunduran dimana kaum intelektual dijadikan sebagai alat oleh para pemilik modal.

Kata Kunci :

Cendekiawan, Kekuasaan, Yudi Latif

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang perspektif Yudi Latif terkait cendekiawan dan kekuasaan di Negara Indonesia. Sebagai mana kita tahu bahwa Peran intelektual atau fungsi sosial spesifik dari para pemikir telah dijalankan sejak lama oleh pandita, resi, kyai, atau ulama. Namun, penggunaan istilah intelektual dan intelegensia dalam konteks Indonesia modern merujuk pada sebuah formasi sosial dan trayek historis yang spesifik, yang muncul sebagai akibat dari di perkenalkannya sistem pendidikan Barat di negeri ini yang pada awalnya dilakukan oleh para misionaris Barat dan Pemerintah

penjajahan Belanda, lalu kemudian oleh lembaga-lembaga sosial yang lain.¹

Dari sela-sela krisis akut dalam dunia politik, Indonesia pada abad yang lalu di Jakarta muncul intelegensia muslim sebagai elit politik dan birokratik yang tengah menanjak. Meningkatnya pengaruh intelegensia muslim, baik secara intelektual, politik dan birokratik, setelah sekian lama mengalami marginalisasi Islam politik, menghadirkan wawasan baru yang menafsirkan betapa pentingnya mempertimbangkan beragam faktor

¹Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kekuasaan "Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta:Democracy Project, 2012), h. 29.

penentu politik dan beragam medan relasi kuasa dalam dunia perpolitikan Indonesia. Di sisi lain, melemahnya daya tarik partai Islam dan berubahnya sikap politik di kalangan anggota senior intelegensia muslim di akhir abad ke-20 mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan keadaan perubahan yang ada dalam sebuah bentangan perkembangan yang berkelanjutan dari intelegensia muslim.²

Sedangkan dalam sebuah kekuasaan itu bersumber pada otoritas (kekuasaan yang didapatkan secara sah pada suatu lembaga), Sumber daya manusia, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya material. Kekuasaan tidak akan ada tanpa adanya penghormatan dan sikap kerja sama dari masyarakat luas. Dengan kata lain, kekuasaan politik terbentang di antara masyarakat dan para pemegang kekuasaan yang kita sebut juga elite politik. Kekuasaan bukan entitas yang intrinsik berada di tangan para pemegang kekuasaan alias elite politik, melainkan entitas yang terbangun di antara masyarakat dan para pemegang kekuasaan. Dalam konteks inilah ide pertanggung jawaban kekuasaan kepada masyarakat luas menjadi hal yang mutlak dalam proses penyelenggaraan kekuasaan.³

Dalam buku Yudi Latif yang berjudul *Negara Paripurna* merefleksikan

kesadaran dan keprihatinannya bahwa krisis yang mendera kehidupan bangsa saat ini begitu luas cakupannya. Beberapa dekade yang lalu, Mohandas K. Gandhi memperkirakan bahwa adanya ancaman yang mematikan dari “tujuh dosa sosial” : politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan”. Ketujuh dosa ini sekarang seakan yang menjadi basis keberadaban (madani) terjerumus ke dalam apa yang disebut Machiavelli sebagai “kota korup” atau apa yang disebut Al-Farabi sebagai Kota Jahiliyah.⁴

Yudi Latif adalah salah satu cendekiawan muda yang ada di Indoensia. Mengapa penulis mengambil Yudi Latif untuk di jadikan sebagai objek kajian adalah karena beliau penuh dengan semangat dalam mengusut penelitian mengenai sejarah pergerakan kaum cendekiawan muslim sejauh pada abad ke-20. Namun berbeda dengan penulis sejarawan pada umumnya, Yudi Latif memberikan perspektif baru dengan mengembangkan suatu gagasan bahwa para cendekiawan muslim ini lahir pada zamannya sebagai usaha mengembangkan perjuangan diskursif atau yang berkaitan dengan nalar untuk menanamkan pemahaman mengenai apa yang disebut sebagai proses penafsiran ke Islaman kembali di dalam konteks Indonesia.

²Yudi, 2012, h. 5-6.

³Muslim Mufti, *Kekuatan Politik Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 252-253.

⁴Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), h. 48.

Adapun latar belakang mengapa penulis mengambil cendekiawan dan kekuasaan dikarenakan banyaknya orang-orang yang berintelektual, dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang banyak yang takut pada oknum-oknum yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sehingga mereka menjadi bungkam, dan membuat sedikit kaum-kaum budayawan khususnya cendekiawan muslim yang muncul dipermukaan untuk membela masyarakat yang tertindas. Dan di sini pemikiran Yudi Latif muncul untuk membangkitkan kembali pemikiran- pemikiran kaum-kaum terdidik ini untuk menuju jalan yang seharusnya mereka lakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif berikut ini dipaparkan studi-studi terdahulu yang dapat membantu dalam memetakan hal-hal apa yang sudah dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya.

Konsep Nasionalisme Dalam Pemikiran Yudi Latif: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila Notonagoro, penelitian oleh Agus Arianto. Hasil penelitian ini ada tiga butir. Pertama, nasionalisme dalam pemikiran Yudi Latif dilandasai oleh historis sosio-kultural Indonesia, yang membagi perkembangan kesadaran nasionalisme di Indonesia menjadi

archaic nationalism, proto-nationalism, dan nasionalisme modern.⁵

Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Mutiani. Pancasila sebagai nilai-nilai integral yang melandasi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila dikembangkan dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan hak, kewajiban, harkat, dan martabat seluruh warga negara, terutama dalam menerapkan sistem demokrasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana urgensi aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.⁶

Peran Cendekiawan dalam Pengembangan Pendidikan Kritis di Indonesia (Studi Pemikiran Antonio gramsci) Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Taufik Abdillah. Pemikiran Antonio Gramsci mengenai peran cendekiawan dalam pengembangan pendidikan kritis adalah 1. Kategori cendekiawan organik dalam pencipta perubahan sosial atau *agen of change*, sedangkan cendekiawan tradisonal berperan sebagai pendorong atau konjungtor dalam perubahan sosial. 2. Cendekiawan berperan dalam penyelenggara pendidikan kritis sebagai tempat menghancurkan batas sekat kelas

⁵Agus Arianto, "Konsep Nasionalisme Dalam Pemikiran Yudi Latif: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila Notonagoro", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

⁶Mutiani, "Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia", *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2, (2015), h. 176-183.

sosial serta sebagai *conter* hegemoni. 3. Pengembangan pendidikan kritis berupaya membangun peserta didik atau masyarakat menjadi aktif yang kemudian berkembang menjadi kreatif dengan basis kolektif, kesadaran sosial yang solid serta homogen. Sedangkan relevansi pemikiran Antonio Gramsci tentang peran cendekiawan dalam pengembangan pendidikan kritis di Indonesia adalah: 1). Cendekiawan organik berperan dalam mengembangkan pendidikan kritis dalam kebudayaan masyarakat dan cendekiawan tradisional. 2). pendidikan kritis dalam masyarakat berupa pemberdayaan sebagai basis kolektif yang solid. 3). Pendidikan kritis dalam pendidikan nasional berupa pembelajaran dengan menempatkan peserta didik dan pendidik sebagai subjek pembelajaran sebagai subjek yang memiliki paradigma struktural kerakyatan yang memiliki wawasan ilmu.⁷

Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Inonesia (ICMI) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015, penelitian skripsi ini dilakukan oleh Nisa'ul Mauliddina. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1). Berdirinya ICMI Orwil Jawa Timur berawal dari pembentukan organisasi wilayah (orwil) oleh pengurus ICMI pusat pada 2 Juni 1991 (2).Eksistensi kiprah ICMI Orwil Jawa Timur tidak lepas dari ICMI Pusat dan situasi Nasional. Dari periode ke periode kebijakan kepengurusan ICMI

Orwil Jawa Timur disesuaikan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang peneliti klasifikasikan dalam tiga masa yakni, masa kebangkitan (1991-2000), masa konsolidasi (2000-2010), dan masa reposisi (2010-2015). (3). Faktor penghambat dan pendukung kiprah ICMI Orwil Jawa Timur terbagi dalam dua faktor, yakni faktor penghambat pendirian dan perkembangan, serta faktor pendukung pendirian dan perkembangan. Faktor penghambat pendirian adalah berbagai kritik atas lahirnya ICMI berkisar pada tiga hal yakni isu eksklusifisme atau primordialisme, soal politisasi dan rekayasa politik juga turut mempengaruhi pendirian ICMI di Jawa Timur.⁸

Dari ragam literatur yang telah dipaparkan di atas, belum ada yang secara spesifik menjelaskan pemikiran Yudi Latif tentang relasi antara cendekiawan dan kekuasaan. Oleh karena itu, studi ini ingin mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah tidak akan bisa lepas dari metode penelitian yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan data di lapangan sampai pada proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian studi tokoh. Sumber data yang

⁷Taufik Abdillah, "Peran Cendekiawan dalam Pengembangan Pendidikan Kritis di Indonesia (Studi Pemikiran Antonio Gramsci)" *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁸Nisa'ul Mauliddina, "Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Inonesia (ICMI) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

di peroleh berupa data primer dan sumber data sekunder.

PEMBAHASAN

Biografi Yudi Latif

Yudi Latif adalah seorang cendekiawan muda yang lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. berasal dari keluarga heterogen dari segi afiliasi politik dan status sosial. Ibunya seorang penari dan penyanyi yang datang dari keluarga menak Sunda. Kakeknya adalah kepala Kantor Inspeksi Pendidikan, lulusan sekolah Belanda yang sangat berorientasi politik ke Soekarno dan masuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Sementara sang ayah adalah seorang guru dari kalangan ulama yang memiliki pondok pesantren di Sukabumi, aktif dalam organisasi Islam, dan masuk dalam NU (Nahdlatul Ulama). Perbedaan ideologi semakin memuncak dipicu oleh ketegangan situasi politik di masa itu, sehingga kedua orang tuanya memutuskan berpisah.⁹

Yudi Latif kecil juga hidup berpindah-pindah dari satu tempat terpencil ke tempat terpencil lainnya mengikuti tugas sang ayah. Meski demikian, Yudi Latif mengaku tidak ada masalah dalam berhubungan dengan teman sebayanya. Rumah bapaknya terbuka bagi siapa saja. Nyaris tiada hari tanpa obrolan dewasa, soal politik, sehingga Yudi Latif terlalu cepat dewasa dari waktu yang sewajarnya,

ujar Yudi Latif yang mengaku mengalami semacam *psychological barrier* untuk melewati masa kanak-kanaknya dengan natural. Dari bapaknya pula Yudi Latif ditanamkan tradisi baca dan menulis, pidato, puisi, dan mengikutkannya pada lomba-lomba. Tradisi panggung Yudi Latif sudah di mulai sejak kelas satu SD.

Yudi Latif Pernah mondok di pesantren Modern Gontor Penorogo, Yudi Latif memperoleh gelar kesarjanaannya dari Universitas Padjadjaran (S1, bidang Komunikasi), dan Australian National University (S2 dan S3, bidang sosiologi politik). Berbagai prestasi akademik dan non-akademik yudi raih sejak di bangku sekolah dasar hingga jenjang doktoralnya. Disertasi doktoralnya tentang “Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia” memberikan terobosan baru dalam studi sosiologi dan sejarah intelektualisme Islam hingga menuai banyak pujian.¹⁰

Karir penelitiannya diawali ketika beliau bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1993. dan terlibat sebagai editor awal rancangan pendirian Universitas Paramadina (1996), tempat Yudi Latif mendirikan berbagai pusat studi dan sempat menjadi wakil rektor dalam urusan pendidikan, kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat.¹¹

Pandangan orang lain mengenai Yudi Latif yang mengatakan : “*Yudi Latif*

⁹Rustika Herlambang, “Yudi Latif” dalam <https://rustikaHerlambang.com/2011/10/02/yudi-latif/> di akses pada tanggal 18/12/2018 pada pukul 20.08

¹⁰Yudi, 2017, h. 667.

¹¹Yudi, 2017, h. 667.

terkenal pada saat diangkat menjadi seorang BPIP pada tahun 2017 itupun sekarang beliau telah mengundurkan diri, memang beliau tidak terlalu populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain namun Yudi Latif juga termasuk cendekiawan muslim muda.”¹²

Memang Yudi Latif tidak terlalu populer di bandingkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya namun memang pemikiran Yudi Latif tentang apa yang dia tuangkan didalam bukunya itu terkait tentang kondisi yang ada sekarang ini. Dan fokus pemikiran Yudi Latif kajian tentang keagamaan, kenegaraan, dan kebangsaan.

Konstruksi Pemikiran Yudi Latif Mengenai Cendekiawan & Kekuasaan

Dalam Teori Relasi Pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault, sangat tertarik dalam meneliti mengenai hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Karena tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang emiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan harus didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau

dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.¹³

Sebelum masuk lebih dalam lagi untuk memahami cendekiawan dan kekuasaan pertama harus memahami terlebih dahulu tentang cendekiawan dalam cendekiawan ada dua dan harus dipahami terlebih dulu apa itu intelektual dan apa itu Intelegensia. Adapaun Intelektual sifatnya selalu personal, terlahir sebagai seseorang yang mampu mengartikulasikan kepentingan dan nilai- nilai kelompok, atau individu yang sebagai artikulator yang menjadi juru bicara dari kepentingan kelompoknya, atau kepentingan nilai-nilai. Sedangkan Intelegensia adalah representasi kelompok jadi dia hadir sudah menjadi suatu penjelmaan kelompok.

“Misalnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), dan ISNU (Ikatan Sarjana Nusantara). Jadi kalau sudah terbentuk sebuah group itu sudah menjadi kelompok Intelegensia, di group Intelegensia di suatu entitas kelompok Intelegensia ada Intelektualnya makanya di group misalnya HMI pasti ada juru bicaranya yang suka menyuarakan nilai-nilai ke HMI-annya.”¹⁴

¹³Umar Kamahi, *TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, (Kupang : Universitas Nusa Cendana, 2017), h.119.

¹⁴Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

¹²Aswar Wijaya Zam, (Kabag Humas LP3I), wawancara di Makassar tanggal 08 Januari 2019.

Jadi singkat kata intelegensia itu adalah semacam kelompok terpelajar yang dipersatukan oleh kesamaan nilai (Agama, atau Identitas), kesamaan latar belakang pendidikan (Sekolah atau Pendidikan Tinggi), dan kesamaan tujuan (Agenda).

Cendekiawan

*“Cendekiawan adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari kata candakia (licik), atau bisa juga candakiamana (betapa liciknya kamu). Candak berasal dari Bahasa Sansekerta yang dalam kurung waktu dari kata licik akan menjadi kata cerdas, cerdas yang dalam pengertian seperti seekor kancil yang cerdas yang pandai dalam menipu, contohnya seperti kancil yang menipu buaya. Jadi kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang ada dimensi kelicikannya. Jadi itu yang saya sebut sebagai Neologisme jadi cendekia ini adalah suatu istilah lama yang diberi makna baru, kecerdasan yang ada kelicikannya. Dalam kurung waktu cendekiawan diberi makna sebagai kaum yang tercerahkan.”*¹⁵

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa Cendekiawan tidak memiliki pemahaman yang pasti seperti Intelektual dan Intelegensia. Sering kali juga penyebutan cendekiawan digunakan untuk menyebut-kan seorang yang berintelektual, misalnya ”Nur Kholis Majid adalah seorang Cendekiawan

Muslim“. Berarti Ia sebagai seorang Intelektual. Namun Cendekiawan juga bisa merujuk pada suatu kelompok, maka muncullah istilah Cendekiawan Muslim, Cendekiawan Kristen, Cendekiawan Kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi Cendekiawan bisa dimaknai seseorang namun bisa juga dimaknai sebagai sekelompok orang Intelektual atau Intelegensia tergantung dari konteksnya.

*“Kalau setahu saya itu Yudi Latif memposisikan sebenarnya cendekiawan itu dalam suatu kekuatan yang destruktif jadi destruktif itu dia yang bisa merusak. Kelicikan kalau istilah kasarnya membodoh-bodohi, kalau itu biasa kalau dia dimanfaatkan oleh kekuasaan, jadi dia kemampuan destruktifnya menjadi lebih besar tapi ada juga pendekatan lainnya Yudi Latif itu melihat kekuasaan bahwa dia memang sesuatu yang produktif dia punya kekuatan mentransformasi perubahan, jadi memang dia menempatkan kekuasaan itu sebagai alat ukur untuk menilai kecendekiawanan”.*¹⁶

Cendekiawan yang Yudi Latif maksudkan bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif tergantung dari bagaimana hubungannya dengan kekuasaan ini. Jadi kekuasaan disini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kecendekiawanan.

¹⁵Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

¹⁶Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel divisi cendekiawan muda ICMI Sul-Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil Dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar tanggal 14 Februari 2019.

*“Saya kira itu adalah masalah konteks yang ada sekarang karena memang banyak misalnya kalau konteks politik misalnya sekarang inikan banyak ilmuwan yang mungkin dimaksudkan bang Yudi sebagai yang licik dalam konteks karena dia memanfaatkan kebenaran yang ada. buat para cendekiawan mestinya kalau dia mau pencerahkan kasih informasi yang betul kemasyarakat ceritakan semisalnya A dia baik dari aspek ini tapi tidak baik dari aspek itu, yang B dia tidak baik dari aspek ini tapi dia baik disebelah sini silahkan masyarakat yang memilih itukan cerah seorang cendekiawan kalau dia mau kasih pencerahan karena ilmu pengetahuan ceritakan depannya ceritakan juga belakangnya tapi itu repot kalau misalnya dia sudah memihak maka itu cenderung akan lebih licik”.*¹⁷

Buat para cendekiawan semestinya kalau dia ingin pencerahkan masyarakat berikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat ceritakan baik dan buruknya, dan biarkan masyarakat yang memilih. Jadi akan kelihatan semua gambarannya, kalau cuman mengatakan dia baik itu hanya berada pada satu sisi saja tapi bagaimana sebelah sisinya kita tidak tahu itu. Namun repotnya kalau misalnya cendekiawan ini dia sudah memihak maka itu akan cenderung lebih licik.

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa Bagaimana kita memahami ICMI

(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), apakah Ikatan Intelektual atau Ikatan Intelegensia, ICMI itu bukan Ikatan Intelektual, makanya jangan berharap orang-orang ICMI itu semuanya merupakan orang-orang yang dengan tingkat kearifan yang tinggi, seseorang yang tidak punya interest kekuasaan itu salah, karena ICMI sejak awal lahir sudah sebagai satu representasi kelompok, yaitu kegelisahan dari kelompok terpelajar muslim, ICMI dimulai sejak tahun 1965, Cak Nur merasa akibat setelah kemerdekaan orang-orang santri yang tadinya sulit untuk masuk kependidikan umum, tiba-tiba setelah kemerdekaan bisa bebas memasuki pendidikan umum. Tentu saja karena jumlah santri memiliki jumlah yang banyak kalau kita lihat pada tahun 1945-1950 masih terjadi perang, jadi gelombang anak-anak santri, dari pesantren, dari manasaja mulai masuk ke pendidikan umum dan perguruan tinggi umum dan ledakannya mulai terjadi.

Yudi Latif dalam melihat pendidikan tinggi pada tahun 50an dan pada tahun 60an mulai terjadi jumlah yang besar bagi sarjana- sarjana dan mahasiswa muslim. Inilah ketika tahun 1960an zama orde lama namanya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) sangat di dominasi oleh orang-orang HMI dan orang-orang PMII jadi mulai tahun 1960an di masa akhir orde lama kaum terpelajar muslim mulai inflak membanjiri dunia pendidikan tinggi dan menunggu waktu lulusan pendidikan tinggi untuk

¹⁷Sukri, (wakil Dekan 1 FISIP UNHAS), dan melakukan wawancara di UNHAS Makassar tanggal 13 Februari 2019.

ingin masuk kejenjang Birokrasi, kepentingan politik dan lain-lain.

Begitu Orde Baru lahir, partai-partai politik Islam, tokoh-tokoh masyumi yang tadinya ingin mendirikan partai masyumi dilarang, jadi yang muncul cuman PPP (Partai Persatuan Pembangunan) namun PPP bukan jenjang yang baik untuk kepemimpinan Nasional, sedangkan Golkar pada waktu itu masih dikuasai oleh sekelompok orang intelegensia Non Islam Sosialis, Nasionalis, dan Lain-lain. Maka akhirnya disitulah mereka masuk kedalam dunia Birokrasi.

Pada tahun 1980 Alumni Intelegensia Muslim yang dari KAMI, HMI, dan lain sebagainya mereka menginginkan peran-peran yang lebih besar, secara Politik dan secara kepentingan Nasional. Kalau jalan sendiri-sendiri tidak mempunyai kekuatan politik untuk menjadi suatu gelombang besar agar kepentingan terhadap peran-peran kepemimpinan yang besar dapat terealisasi maka sudah sejak lama mereka menginginkan adanya pembentukan semacam kelompok Intelegensia Muslim yang harus bersekutu, harus berkelompok. Himaduddin dan lain-lain memimpin orang-orang Muslim sebagai individu-individu harus berkelompok agar menjadi presos Politik yang kuat itulah pada tahun 1990 akhirnya melahirkan ICMI. Jadi ICMI itu sejak awal sudah menjadi Formasi kelompok bukan sebagai Individual tapi sudah kepentingan kelompok makanya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia bukan kelompok Intelektual tapi Intelegensia,

dengan kepentingan agenda kolektif jangan heran jika ICMI itu terdiri dari manusia dengan berbagai macam latar belakang, yang tidak jelas asal usulnya. Yang masuk dalam ICMI bukan hanya yang berlatar belakang HMI atau yang tidak ada cap Islamnya.

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa Salah kaprah kalau mengharapkan ICMI terdiri dari kaum Intelektual yang tidak mempunyai inters Politik. Sejak awal terbentuknya ICMI itu sudah mempunyai inters politik tapi didalam ICMI ada Intelektualnya seperti Wawandaharjo, dan Nur Khalis Majid yang sifatnya selalu menjadi juru bicara, artikulat dari nilai- nilai kelompok, dan kepentingan kelompok. Adakalanya kaum intelektual ini melakukan kritik internal dengan Cak Nur yang melawan kritik Internalnya sendiri, bahkan terhadap HMI, saja iya berkata “Kalau Perlu HMI itu bubarkan saja deh kalau memang tidak serius, dan tidak kuat lagi” Intelektual itu selalu mempunyai kemampuan yang berjarak dengan kepentingan kekuasaan biarpun sudah menjadi ketua BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bisa mengundurkan diri kalau masih ada jiwa Intelektualnya. Karena seorang Intelektual Ia mendedikasikan dirinya pada nilai bukan semata-mata pada kekuasaan tapi kalau Intelegensia memang sejak awal namanya kolektivitas itu selalu mempunyai kepentingan kekuasaan kalau orang sudah berkelompok pasti mempunyai kepentingan politik, intelektual itu selalu mempunyai kemampuan untuk mengambil jarak dari

kelompoknya, di satu sisi dia bisa menjadi penyemai nilai dari kelompoknya tapi adakalanya juga iya akan melakukan kritik terhadap kelompok internalnya sendiri karena kebebasan peninjauan intelektualnya.

*“Tapi organisasi-organisasi juga seperti ICMI inikan dulu sebenarnya ICMI itu didirikan untuk mewadahi kekuatan intelegensia, dengan masuk ICMI dia berharap bisa mempengaruhi kekuasaan tapi ternyata sebaliknya ada juga beberapa pemikir-pemikir ICMI justru dia larut dan menjadi bagian yang mengokohkan dan melegitimasi kekuasaan yang demokratis ketika suharto yang berkuasa saat itu itulah yang dilihat Yudi Latif bahwa memang tidak mudah. untuk ICMI juga itu ada positifnya ada baiknya ada negatifnya, karena kadang juga larut dalam kekuasaan dia seperti humas pemerintah dia membenarkan semua kebijakan-kebijakan tanpa memberikan tawaran alternatif atau resolusi baru”.*¹⁸

Jadi bahwasanya ICMI ini di dirikan untuk mewadahi kekuatan dari intelegensia, yang berharap ketika berada di dalam organisasi ICMI dapat mempengaruhi kekuasaan namun sayangnya tidak mudah. Karena beberapa juga ada yang mengikuti arus kekuasaan atau larut dalam kekuasaan, yang

menjadikan dirinya seperti humas pemerintahan yang membenarkan semua kebijakan-kebijakan tanpa memberikan suatu tawaran atau alternatif lain kepada masyarakat.

ICMI dapat dipandang sebagai simbol kebangkitan Islam di Indonesia. Kebangkitan ini merupakan proses alami bagi setiap komunitas, terutama mereka yang ingin menampilkan dan mempertahankan aspek keberlanjutan agama yang direkomendasikan dalam ajaran Islam. ICMI sebagai organisasi Islam adalah sangat prihatin dengan perkembangan aspek politik, khususnya perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Konsep masyarakat sipil dalam tulisan-tulisan Nurcholis Madjid dan Dawam Rahardjo memiliki sangat penting bagi ICMI karena mereka memberikan konsep teoritis masyarakat sipil Islam yang dapat diberikan aplikasi praktis. Dari sudut pandang Madjid dan Dawam, gagasan masyarakat madani lebih komprehensif daripada konsep masyarakat sipil dalam teori Barat, karena ada dimensi spiritual dalam masyarakat madani.¹⁹

Kalau dilihat di Indonesia sekarang ini kaum terdidik makin banyak, terdidik Islam juga banyak ada yang bergabung di

¹⁸Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel divisi cendekiawan muda ICMI Sul- Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar tanggal 14 Februari 2019.

¹⁹Muhammad Saleh Tajuddin, “The Role of ICMI on The Development of Political Aspect: Study in the Beginning of Reformation Era”, *Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia (Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia)* (Makassar:Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019). h. 45-46.

HMI, setelah itu ada di KAMI, tapi yang di habisi adalah kaum intelektual karena memerlukan kebebasan berjarak dari Identitas kelompoknya yang bisa menjadi artikulator kelompok sekaligus dapat berjarak dari kepentingan-kepentingan kelompoknya kalau kepentingan kelompok itu sudah mematikan daya nalar Intelektualnya.

Kekuasaan

Teori Kekuasaan Delier Noer dalam *Pengantar ke Pemikiran Politik* menyebutkan: “ Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada Negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum Negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan Negara”.²⁰

Sedangkan Yudi Latif mengatakan bahwa kekuasaan adalah “*Power adalah suatu daya, suatu kekuatan yang di perlukan untuk kehidupan manusia, tidak ada kehidupan tanpa power (kuasa). Power dalam pengertian yang alamiah kesanggupan manusia untuk saling mempengaruhi atau mempengaruhi yang lain, power ini juga tidak selalu harus berkaitan dengan power politik dengan*

power negara dalam hubungan kita pun berkembang power yang saling mempengaruhi atau mempunyai pengaruh. Power dapat bermodal pengetahuan.”²¹

Jadi pada diri manusia mempunyai suatu masing-masing kemampuan untuk saling mempengaruhi yang lain. Dan tanpa kemampuan saling mempengaruhi kehidupan sosial tidak akan terjadi, karena manusia tidak bisa mengajak untuk memprusiasi yang lain. Berarti ketika kita Tidak bisa mempengaruhi yang lain tidak akan ada kehidupan kolektif yang akan terjadi.

Power dalam situasi yang normal sifatnya reversal berarti bisa dibalik artinya manusia mempunyai modal kuasa dapat bersifat pengetahuan, kecantikan, modal otot, dan ada yang menggunakan modal uang. Setiap orang mempunyai daya yang memungkinkan untuk dapat mempengaruhi yang lain, pada dasarnya menurut Yudi Latif ada 3 sumber utama kuasa itu : Modal Politik, Modal Finansial, dan Modal Kultural (pengetahuan).

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa Power Normal jikalau modal politik, modal finansial (ekonomi), dan modal Kultural (budaya) masih tersebar di beberapa titik, jadi power itu normal dan konstruktif kalau masih bisa saling mempengaruhi, dan saling memutar balikkan. Karena itu kehidupan

²⁰Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.18-19.

²¹Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

seharusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan tertentu. Power menjadi berbahaya jika modal Politik, Ekonomi. Dan Budaya di satu tangan, seperti sekarang ini konglomerat mampu menghimpun seluruh modal itu pada dirinya, dia menguasai media (modal budaya), modal ekonomi, dan bahkan mendirikan partai politik misalnya Hary Tanoesoedibjo, *The Power Of Politic* itu berarti ia menguasai tiga modal utama dalam satu tangan. Jika power dimana modal politik, budaya, dan ekonomi dalam satu tangan orang itu tidak bisa mengembalikan, yang seharusnya budaya ada ditempat lain namun ia memiliki media, mempunyai partai, perusahaanpun ia miliki. Situasi power yang menghimpun segala modal dalam satu tangan membuat relasi dominatif bukan lagi yang mampu dibalik tapi sudah dominan, yang dimana pengusaha ini mampu mendominasi semua hal karena menguasai seluruh modal power dalam satu tangan, relasi power seperti relasi dominate relasinya satu arah dan tidak bisa dibalik, kalau relasi itu yang dipertanyakan maka yang terjadi adalah sebuah penindasan.

“Kekuasaan ada tiga medan yaitu modal, kekuasaan, dan kebudayaan. ditiga ruang interaksi itu ujian-ujian kecendekiawanan itu dipertaruhkan kalau dia berteman dengan pengusaha, dia berteman dengan penguasa bagaimana sikapnya sebagai seorang intelektual. Setau saya kalau Yudi Latif melihat kecendekia itu, dia melihat yang punya kekuatan transformasi atau kekuatan produktif tapi dia juga bisa

*deskriptif dia bisa bermakna negatif dan bisa juga bermakna positif tergantung bagaimana membangun jarak dengan kekuasaan memang di pengalaman Orde Baru itukan banyak intelektual yang namanya teknokrat itu masuk didalam bagian kekuasaan justru ini yang dianggap destruktif karena dia bagian yang melehmahkan bagian yang membantu kekuasaan membungkam ekspresi, membungkam potensi yang ada di masyarakat bahkan menjadi tidak demokratis pada itu”.*²²

Hasil wawancara menyimpulkan Itulah kekuasaan jika di pegang oleh seorang cendekiawan yang sudah masuk dalam lingkaran penguasa mereka mampu membungkam ekspresi, membungkam potensi yang ada di masyarakat bahkan menjadikannya tidak demokratis.

Cendekiawan & Kekuasaan di Indonesia Menurut Yudi Latif

“Mengapa Intelgensia Muslim merasa untuk membentuk sebuah pengelompokan identitas yang didalamnya seperti HMI, dan ICMI ini karena adanya Legasi dari kolonial dimasa itu memang jumlah muslim yang banyak dan selalu mendapatkan tridmen dari pemerintahan kolonial untuk marginal secara ekonomi dan akhirnya juga di diapolitisasikan, kalau dilihat pada zaman kolonial ekonomi-ekonomi besar seperti perkebun

²²Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel devisi cendekiawan muda ICMI Sul- Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar tanggal 14 Februari 2019.

-an, perbangkan dikuasai oleh Eropa sedangkan perdagangan per antara dikuasai oleh kelompok-kelompok asing di Cina dan lain-lain jadi santri yang tadinya menjadi pedagang lama kelamaan indsuti- industri santri bergelimbangan atau berjatuhan. Sebab berbahaya kalau santri yang menguasai ekonomi karena itu berarti menguasai kekuatan Massa (Politik).”²³

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa itulah mengapa kelompok santri kelompok muslim taat ini harus dilemahkan secara ekonomi dan kebijakan ini terus bertahan sampai pada Orde Baru, secara politik juga akan terus dilemahkan, kemampuan muslim untuk mengorganisasikan diri secara politik akan terus di lemahkan sampai pada Orde Baru pun kemampuan untuk membentuk partai akan dikucilkan, namun hanya partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang di kanalisasi namun partai ini tidak mempunyai cukup pengaruh yang luar biasa, akibatnya karena masuk ke ekonomi santri jatuh, kepolitik pun juga terbatas mulailah pada tahun 1970an kaum santri ini lebih mengarahkan energinya pada dunia pendidikan, masuk dunia pendidikan umum, dan pendidikan tinggi. Jadi lama-lama terjadilah suatu proses Imigrasi dari santri yang dulunya itu pedagang menjadi Birokrat karena jalur menuju ekonomi sudah dikuasai oleh

kelompok-kelompok lain, jalur politik santri di batasi. Menurut Yudi Latif :

“Hasrat manusia kalau di sini dibentengi disana dibentengi dia akan mencari saluran baru. Seperti Cina karena untuk masuk Birokrasi tidak boleh, militer tidak boleh jadi satu-satunya yang masih tersedia hanyalah ekonomi bisnis, yang akhirnya Cina konsentrasi di Bisnis. Dan santri, ekonomi pesaingnya kuat, masuk politik juga Golkar dan Lain-lain tidak di halalkan masuk, dan PPP partai yang tidak power full, maka masuklah pendidikan itu ke Birokrasi dan tidak mengetahui untuk menunjukkan afialisasi politiknya begitu akhir tahun 1980an jumlah santri yang sudah menguasai Birokrasi jumlahnya meningkat dan menginginkan peran-peran yang lebih penting disitulah mereka membentuk ICMI yang dengan itu memang berhasil di zaman Habibie, Abdul Rahman Wahid, banyak santri yang akhirnya di ujung Orde Baru santri menjadi elit politik.”

Hasil dari wawancara penulis menyimpulkan bahwa kaum intelegensia pada masa Orde Baru kebijakan untuk melemahkan kelompok muslim bertahan sampai pada Orde Baru, secara politik juga akan terus dilemahkan, kemampuan muslim untuk mengorganisasikan dirinya dalam politikpun akan terus di lemahkan sampai pada Orde Baru kemampuan untuk membentuk partai akan terus dilemahkan, inilah permainan oleh kaum penguasa dalam melemahkan pergerakan kaum muslim taat.

²³Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

Pada masa akhir kekuasaan Suharto, sejak tahun 1960-an berlangsung proses demoralisasi yang melanda politisi muslim, berbagai figur intelegensia muslim secara mengejutkan memainkan peran sentral dalam wacana sosial-politik Indonesia. Isu-isu yang terkait tentang intelegensia muslim ini semakin mendapatkan perhatian media yang luas, menyusul terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) pada bulan Desember 1990.²⁴

Namun desain Orde Baru ambruk, Ketika gerakan reformasi muncul pada 1997/1998, beberapa *figure* inteligenia muslim memainkan peranan yang penting dalam proses pengunduran diri soeharto. Inteligenia muslim semakin nyata di masa pemerintahan Habibie, karena masa itu banyak anggota kabinet yang berasal dari anggota ICMI. Pencapaian politik inteligenia muslim naik dengan terpilihnya Abdurahman Wahid (mantan ketua tanfidziyah Nahdlatul Ulama) sebagai presiden pasca-Habibie, yang disusul dengan penunjukan figure-figur muslim sebagai pejabat-pejabat senior negara.²⁵ Demokrasi reformasi sangat mengandalkan modal sedangkan santri jarang ada yang menjadi pengusaha-pengusaha besar begitu zaman reformasi politik memerlukan modal besar akhirnya juga kita lihat pemilihan semuanya yang menguasai partai politik di Indonesia secara domino jadi maksudnya politik santri atau politik inteligenia muslim ini

gunanya didorong untuk mengambil peran-peran aktualisasi dirinya jadi sinkron dengan itu akhirnya demi memperjuangkan kepentingan manusia tidak lepas dari yang namanya kepentingan karena semua mempunyai kepentingan.

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa namun *setting* politik yang berbeda membuat dinamika pengelompokan intelegensia muslim juga berubah dan ketika Orde Baru jatuh dan masuk ke Orde Reformasi, kalau dulu politik zaman Orde Baru yang ada cuman Golkar, PPP, dan PDIP dan karena PPP dan PDIP tidak terlalu kuat yang dominan adalah Golkar maka dari pada masuk PPP waktu itu lebih memilih masuk kepressure group atau kelompok penekan muncullah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang lebih efektif ketimbang masuk kepartai PPP namun begitu Orde Baru *claiming* masuk ke Orde Reformasi pintu masuk kekuasaan itu melalui partai politik segeralah kaum Inteligenia di ICMI pun segera pecah kedalam kelompok-kelompok partai politik. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Yudi Latif, yaitu :

“Hampir semua bahkan elit-elit ICMI ada Adisasono yang tidak langsung membantu Habibie dalam Golkar tapi dia membuat partai sendiri Partai Merdeka kalau tidak salah apalagi Yusril, Isinda Mahendra PBB jadi waktu itu sebelas saja orang ICMI. Begitu masuk kepolitik kepartaian internal kemudian pecah karena kita lihat ICMI tidak lagi aktif

²⁴Yudi, 2012, h. 2.

²⁵Yudi, 2012, h. 2.

untuk memperjuangkan kekuasaan karena sekarang eranya partai politik jadi bentuklah mereka partai ada yang membentuk PKS, PBB, dan ada yang membentuk PAN dan Golkar sendiri pada waktu itu berada pada pengaruh Habibie jadi pada awal Orde Reoformasi banyak kelompok dan banyak partai tapi sebenarnya banyak orang ICMI. Begitu ICMI yang mendirikan partai terpecah belah. Setelah Reformasi berjalan orang-orang ICMI yang menguasai partai dalam perkembangan waktu terpinggirkan, karena partai sekarang segera memerlukan modal politik yang mahal yang tidak dapat mereka penuhi. Maka satu-persatu jatuhlah lagi partai-partai yang dipimpin oleh Intelegensia Muslim ini kecuali PKB dan PAN karena PKB mempunyai Basis tradisional NU (Nahdatul Ulama) berarti masih mempunyai modal budaya, PAN sebenarnya agak goyah karena PAN adalah kelompok Penerus Perkotaan yang tidak selalu mempunyai solidaritas kultural yang sama seperti NU, Karena ada PKS juga yang sama iya muslim perkotaan sama seperti PAN.”²⁶

Intelegensia dan intelektual merupakan sesuatu yang sangat problematik. Kedua istilah tersebut telah dipergunakan secara tumpang tindih dalam wacana mengenai sejarah dan politik Indonesia. Takkan ada pemahaman bahwa masing-masing memiliki genealogi dan formasi sosilnya

sendiri-sendiri, sehingga karena itu keduanya merujuk pada suatu konsep dan fenomena sosial yang berbeda.²⁷

Intelegensia berbeda dengan intelektual, intelegensia tampil sejak awal sebagai sebuah strata sosial. Strata sosial ini muncul di Polandia dan Rusia pada masa kekuasaan Peter Agung (*Peter the Great*) namun baru mendapatkan bentuknya pada tahun 1860-an. Strata ini terdiri dari lapisan masyarakat yang lebih terdidik, namun berbeda dengan kalangan terdidik lainnya dari kelas atas. Elemen pembentuk utama dari strata yang sedang menanjak ini adalah pendidikan dan orientasinya pada kebudayaan Eropa, terutama pada bidang pengetahuan teknis dan sains, yang melampaui pengadopsian perilaku dan tata krama Eropa yang telah lama dilakukan oleh para bangsawan.²⁸

Cendekiawan atau intelektual ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan, sama dengan pengetahuan apabila manusia melihat, meraba, merasakan sesuatu apa adanya dengan upaya untuk memahami lebih lanjut itu akan memperoleh suatu pengetahuan. Wujud dari pengungkapan pengetahuan dinyatakan dengan deskripsi. Pengetahuan yang memahami kausalitas (Sebab Akibat) dan *universal* disebut ilmu. Wujud keilmuan adalah teori-teori atau proposisi, proposisi eksplanatif. Jadi

²⁶Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

²⁷Yudi, 2012, h. 15.

²⁸Yudi, 2012, h. 17.

ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu.²⁹

Jadi singkat kata Intelegensia Muslim ini berpolitik ada masanya sebagai sumber untuk memperjuangkan perasaan ketersisihan karena ada dalam suatu situasi dimana suatu kelompok merasa tersisih atau ditermarginalisasikan secara ekonomi politik dan pasti kalau ekonomi mereka tidak punya apa-apapun untuk membangkitkan simbol identitas kulturalnya, identitas kultural itu bermacam-macam misalnya Papua Karena mereka merasa dimarginalkan oleh orang-orang di Jawa mereka akan mengeluarkan identitas kepapuaannya kalau muslim pasti akan membangkitkan identitas kemuslimannya jadi pergerakan pergerakan Intelegensia Muslim itu hadir pada awalnya karena persepsi tentang adanya proses marginalisasi.

Fenomena Hubungan Cendekiawan & Kekuasaan

Salah satu masalah yang muncul pada awal tahun 1959-an waktu itu adalah status politik ilmu pengetahuan dan fungsi ideologi yang dipakai. Ini bukan seperti usaha Lysenko yang mendominasi segala sesuatu, namun saya percaya bahwa di sekitar kejadian- kejadian yang tidak bersih yang selama ini terkubur dan tersembunyi dengan hati-hati terdapat pertanyaan menarik yang semuanya membuat marah. Ini semua dapat ditarik kesimpulan dengan dua kata: Kekuasaan

dan Pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, teoretis, atau kimia organik, orang menghadapi masalah mengenai relasinya dengan sebagai struktur politik dan ekonomi masyarakat, tidakkah mereka malah akan menghadapi sebuah pertanyaan rumit yang berlebih-lebihan, dan menempatkan sebuah batasan di mana penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk naik lebih tinggi.³⁰

Hampir seratus tahun setelah penetapan Politik Etis Belanda, banyak rezim silih berganti, sistem demi sistem ekonomi dan politik jatuh bangun, dan generasi demi generasi Intelegensia Indonesia telah berlalu. Namun Intelegensia Indonesia masih tetap menjadi inti dari elit politik Indonesia. Meskipun presentase sosial Intelegensia telah merosot sebagai akibat dari ledakan kuantitatif dari orang-orang terdidik, mentalitas dasar dari Intelegensia saat ini masih merefleksikan sikap priyayi di masa lalu: elitisme. Di bawah semangat elitism, populisme masih tetap kuat sebagai kesadaran diskursif, namun lemah sebagai kesadaran praktis.³¹

Politik Indonesia hari ini lambat laun akan menghadirkan penjajahan baru Karena kelak pemilik-pemilik modal itulah yang membuat kaum Intelektual menjadi pembawa tas untuk kaum pemodal, orang lulusan perguruan tinggi luar negeri

²⁹Kabul Budiyo, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung : ALFABETA, 2012), h. 2.

³⁰Michel Foucault, *Power/Knowledge Wacana kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, 2017), h. 143.

³¹Yudi, 2012, h. 725.

kembali ke tanah air hanya menjadi pembawa tas dari pemodal itu, jadi katanya power dalam strategi permainan merdeka, permainan- permainan strategis diantara orang-orang merdeka kapan kita merdeka, tentu saja jikalau daya kuasa terdistribusi pada banyak tempat tidak di konstrelisasi pada satu tangan, politik Indonesia hari ini itu berbahaya.

“Memang betul juga karena ada fenomena sekarang migrasi pengusaha yang menjadi penguasa yah artinya kayak Jusuf Kalla begitu, orang-orang yang dulunya pebisnis kemudian masuk menjadi penguasa inilah yang membuat yang namanya oligarki ada istilah oligarki yang ada kelompok tertentu yang menguasai sumber daya ekonomi politik kelompok inilah yang berpindah- pindah siapapun yang berkuasa dia tetap menjadi bagian dari kekuasaan itu dan memang mereka juga sering di soceng (social engineering) atau rekayasa sosial oleh kekuatan kecendekiawanan kekuatan kaum intelektual tetapi itu tadi memang betul bahwa posisi cendekiawan atau posisi kaum intelegensia yang lebih seperti penyokong kalau istilah kasarnya itu kayak pembawa tas memang dia lebih di perlakukan sebagai pembantu untuk mengokohkan atau melegitimasi kebijakan-kebijakannya yang lebih Neo Liberal yang Pro Pasar Bebas begitulah politik kita memang sekarang itu begtu jadi demokrasi kita itu sangat liberal karena kekuasaan demokrasi elektoral itu dikelola dengan berbasis biaya yang besar begtu mahal sekalipun ini demokrasi kita sehingga orang yang bisa

*tampil dalam kekuasaan orang yang memiliki akses dengan dunia kapital dengan pengusaha-pengusaha yang paling memungkinkan, kecendekiawan memang hanya menjadi unsur yang mengokohkan atau melegitimasi saja dia tidak menjaga pasar yang bisa mengontrol kekuasaan dia menjadi bagian dari kekuasaan itu tadi dan tidak dalam posisi menjadi oposisi menjadi penyeimbang untuk menjadi kekuasaan itulah kondisi politik kita sekarang betul itu kalau menurut saya”.*³²

Pemilik modal ekonomi kemudian beralih menjadi seorang pemilik kekuasaan politik dan dalam posisi yang seperti itu kecendekiawanan yang memang hanya menjadi unsur mengokohkan atau melegitimasi saja dia tidak menjaga pasar yang bisa mengontrol kekuasaan dia menjadi bagian dari kekuasaan dan tidak dalam posisi menjadi oposisi menjadi penyeimbang.

“Jadi maksudnya begini suatu saat para ilmunan para cendekiawan itu kan dianggap semuanya akan berfikirkan uang adalah segala-segalanya sehingga kemudian dia akan mengabdikan pada siapa yang bisa memberi uang jadi ilmu pengetahuannya akan dia manfaatkan untuk mendukung siapa yang bisa memberi uang meskipun itu salah. Barang kali yah kemungkinan itu ada

³²Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel devisi cendekiawan muda ICMI Sul- Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar tanggal 14 Februari 2019.

potensi itu ada. Sekarang pertanyaannya apakah semua cendekiawan itu akan ada diposisi itu karena menjadi orang yang mengikuti. Semua sesuatu itu kan pilihan bukan paksaan saya mau tunduk pada bupati kalau itu saya mau jadi PNS di daerah saya mau tunduk pada gubernur kalau itu saya jadi PNS di gubernuran saya mau tunduk pada menteri misalkan kalau jadi PNS dimana saya mau tunduk pada rektor maka jadi dosen misalkan itu kan pilihan ada yang memaksa tidak ada. yah asumsi pak Yudi memang ada kecenderungan memang bahwa dia mau bilang bahwa kan semua orang butuh uang pada akhirnya apapun yang kita lakukan mengarah pada uang sebagai hal yang kita cari betul-betul. Saya masih kerja sampai sore salah satunya kan karena uang salah satunya tapi uang bukan segala-galanya".³³

Lebih lanjut, Sukri mengatakan bahwa. Apakah kemudian semua akan mengabdikan pada uang tentu tidak itu tergantung dari bagaimana ilmuwan meletakkannya, pertama. yang kedua itu juga tergantung dari bagaimana nantinya kemudian kondisi politik kita, apakah kemudian misalnya politik kita memang hanya akan dikuasai oleh para pemilik modal. Kalau mereka berkuasa barangkali bisa saja akan seperti itu, namun pak Sukri yakin bahwa ada aspek dimana para cendekiawan yang masih tercahkan yang mempunyai etika ia

akan mendukung kekuasaan sejauh yang di mungkin.

Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan bahwa di zaman Orde Baru untuk menjadi pejabat sifatnya tidak membeli, kalau dilihat menteri-menteri pada masa itu namanya teknokrat yang dimana betul-betul mereka menjadi menteri bukan karena latar belakang partai atau mempunyai uang yang bisa menyogok, tapi dari dasar kemampuan ilmunya hampir semua seperti itu pada masa Orde Baru. Sehingga orang-orang dalam bidang Ekonomi, Ekonomi yang jempolan karena sesuai bidang keahliannya. Menteri pertanian benar-benar ahli-ahli bidang pertanian pada saat itu misalnya, meskipun mempunyai modal contohnya orang Tionghoa yang mempunyai banyak modal tapi tentu belum bisa untuk berkuasa karena pada waktu itu kekuasaan digenggam oleh kekuatan tentara jadi meskipun Cina sekuat apapun dijamin Orde Baru tidak mampu untuk berkuasa namun mereka hanya menguasai sektor Ekonomi tapi kekuasaan di kuasai oleh kelompok lain terutama Militer jadi relatif sebenarnya hubungan power itu relatif masih dapat dikontekstasikan dimasa lalu, orang mungkin tidak mempunyai modal pada waktu itu tidak bisa masuk dalam parati politik, namun karena dia adalah seorang professor yang hebat mereka bisa berkuasa jadi menteri misalnya seperti Emil Salim dan seterusnya. Seseorang mempunyai modal banyak belum tentu mampu untuk berkuasa di zaman Orde Baru orang-orang Tionghoa jarang ada yang mempunyai partai, jarang ada yang

³³Sukri, (Wakil Dekan 1 FISIP UNHAS), wawancara di UNHAS Makassar tanggal 13 Februari 2019.

bisa mengendalikan kebangsaan. Karena powernya terbagi-bagi ada yang memiliki power tentara dan lain-lain, Intelegensia menguasai bidangnya. Sekarang pengusaha sudah menguasai tiga modal utama kekuasaan di dalam satu tangan pertama iya mempunyai perusahaan (Modal) yang banyak, setelah itu iya membuka televisinya sendiri dengan jaringan medianya, dan akhirnya iya juga membentuk suatu parti politiknya sendiri makanya sekarang ini akses terhadap kuasa ini sangat terbatas pada orang-orang tertentu. Coba lihat seluruh ketua partai di Indonesia siapa pastilah seorang pengusaha, bahkan Golkar pun jatuh ditangan pengusaha bahkan militerpun tidak berdaya memimpin Golkar. Semua ketua partai di Indonesia ada ditangan pengusaha.

“Orang mungkin berbicara Demokrasi tapi hakekatnya tidak ada demokrasi di Indonesia karena demokrasi adalah daulat rakyat, yang harus bisa mengendalikan dan mengontrol kebijakan politik sekarang rakyat banyak yang hanya di minta untuk ikut PEMILU (Pemilihan Umum), mencoblos mulai dari pusat sampai pemilihan bupati tapi setelah terpilih. Pemimpin politik yang terpilih seharusnya pertama yang mereka lakukan adalah menghormati daulat rakyat, namun pemimpin terpilih lebih menghormati daulat pemodal.”³⁴

³⁴Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

Yudi Latif melanjutkan ketika politik jatuh kedaulat pemodal maka seluruh aset pemberdayaan lokal jatuh pada penguasaan modal. Coba lihat tambang yang ada di Indonesia makin mudah jatuh pada kepenguasaan pemodal bukan kepenguasaan rakyat, itu yang membuat kensejangan sosial di Indonesia makin melebar, dan semakin mahal biaya politik yang berarti semakin jatuhlah sumber daya pada pemilik modal besar. Maka coba dilihat pada Orde Baru jumlah izin tambang di Indonesia baru sekitar 500 sekarang jumlah izin tambang hampir 15 Ribu dan siapa yang menguasainya adalah pemodal-pemodal besar, cuman beberapa yang masih di kuasai oleh pemodal di daerah selebihnya dikuasai oleh pemodal asing.

Namanya demokrasi namun hakekatnya sudah Oligarki yang kekuasaan sudah dikuasai oleh pengusaha. Kita harus memahami ini baru dapat memahami hakekat sesungguhnya dibalik politik di Indonesia. Indonesia hari ini daya daulat rakyatnya jauh lebih lemah dibandingkan daya daulat rakyat di masa lalu. Kalau kampus mahasiswa sudah demo para politikus sudah gelisah, sekarang mana ada mahasiswa yang demo semuanya sudah di *nina bobokan* oleh konsumer yang di pasok oleh para pemodal.

Banjir uang yang mengalir kedunia politik hari ini membawa “polusi pada demokrasi dan kehidupan publik”. Satu-satunya nilai yang dijadikan haluan adalah nilai uang. Dengan begitu, kepentingan investor nyaris selalu dimenangkan ketika nilai-

nilai kebijakan sipil dan idela-ideal kewarganegaraan tidak memiliki kekuatan yang efektif untuk mengekspresikan diri.³⁵ Lemahnya penegakan prinsip *rule of law*, yang menjamin setiap warga sederajat di depan hukum, menjadi rantai terlemah dalam usaha pelaksanaan birokrasi yang berkeadilan. Usaha ini akan semakin sulit ketika segala hal yang bersifat publik mengalami proses privatisasi. Watak birokrasi yang sejak lama menghambat pada daulat penguasa akan semakin mengalami pengerdilan menjadi hamba dari daulat uang.³⁶

Demokrasi menjadi ajang transaksi persekongkolan antara pemodal dan politikus. Untuk keluar dari krisis ekonomi dan krisis otoritas tersebut, Sachs merekomendasikan perlunya meninggalkan kecenderungan fundamentalisme pasar dengan memulihkan kembali peran negara yang berjejak pada nilai kebijakan sipil (*civil virtue*) dan jalan karakter bangsa. Seturut dengan itu, jalan kemaslahatan Indonesia dalam ekonomi dan politik, yang menekankan semangat gotong royong berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.³⁷

“Itulah demokrasi kita sekarang karena belum berbasis hanya melihat masyarakat itu sebagai voters sebagai pemilik suara bukan citizen kalau citizen itu warga

*negara yang aktif yang punya hak untuk mengontrol kekuasaan sekarang ini pemimpin kita bahkan medesain demokrasi memang hanya memperlakukan masyarakat sekedar voters pemilik suara yang sangat kuantitatif tidak berkualitas selesai pemilihan mereka akan ditinggalkan karena dia dianggap hanya hubungan pemimpin dengan pemilihnya, itu hanya berakhir dikotak pemilihan saja setelah itu bukan lagi. Apalagi juga proses pemilihan juga sangat transaksional orang bisa beli suara. Sekarang money politik terjadi dengan maraknya sehingga pemimpin yang berkuasa juga menganggap bahwa saya sih tidak ada urusan dengan pemilih sayakan sudah bayar mereka sebelumnya”.*³⁸

Hasil wawancara untuk mengontrol kekuasaan sekarang ini pemimpin kita bahkan medesain demokrasi. Masyarakat hanya diperlakukan sebagai sekedar voters pemilik suara yang sangat kuantitatif tidak berkualitas. Selesai pemilihan mereka akan ditinggalkan karena mereka dianggap hanya sebagai hubungan pemimpin dengan pemilihnya saja dan itu hanya berakhir di kotak suara saja setelah itu bukan lagi. Inilah yang membuat tidak adanya mekanisme hubungan yang baik dalam relasi pemilih yang istilahnya *citizen* atau warga negara aktif, tidak hanya sekedar sebagai pemegang suara atau tidak hanya sekedar *voters*. *Citizen*

³⁵Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. (Jakarta :Mizan, 2018), h.14.

³⁶Yudi, 2018, h.15-16.

³⁷Yudi, 2018, h.18.

³⁸Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel devisi cendekiawan muda ICMI Sul-Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar pada tanggal 14 Februari 2019.

dalam makna yang substantif itu hanya sebagai warga negara yang aktif dan dia tidak hanya dilihat sekedar jumlah dari pendukung siapa. Tidak seperti itu tapi dia harus mampu untuk berdialog intensif dengan penguasanya dan mereka harus diperlakukan sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya.

Mahasiswa hari ini memiliki pergeseran dahulu mahasiswa betul-betul menjadi suatu kelompok yang istimewa pada masa ketika tidak banyak orang yang masuk dipendidikan tinggi umum. Mahasiswa dulu adalah suatu kelompok elit yang terhormat apa lagi pada awal tahun 1920 pada masa Soekarno dan Hatta cuman beberapa segelintir orang yang dapat menjadi mahasiswa jadi waktu itu menjadi mahasiswa otomatis akan menjadi pemimpin karena mereka elit yang terseleksi yang jumlahnya sedikit yang menguasai pendidikan modern makanya dengan modal kultural mereka sudah bisa menjadi pemimpin dalam perkembangannya karena mereka merasa kelompok yang istimewa yang tidak banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan tinggi maka dia juga punya perasaan yang namanya semacam kewajiban suci sebagai kaum terpelajar.

Jadi dahulu menjadi mahasiswa itu mereka merasa sebagai kelompok yang terhormat oleh karena itu merasa mempunyai kewajiban luhur untuk berbakti dan untuk menjadi juru bicara atau pejuang agen perubahan dari masyarakatnya itu masih bertahan kira-kira sampai Orde Lama masih dapat bertahan tapi di ujung Orde

Baru pertama itu jumlah mahasiswa sudah cukup banyak bahkan pengangguran presentasi pengangguran sarjana kalau kita lihat sekarang presentase yang menjadi pengangguran lebih banyak pengangguran dari kelompok sarjana jadi untuk menjadi sarjana itu bukan lagi menjadi suatu hal yang istimewa bahkan menjadi sarjana banyak kemungkinan yang akan menjadi pengangguran.

“Maka di akhir Orde Baru menjadi sarjana tidak lagi mendapatkan sesuatu hal yang istimewa dan otomatis menjadi pemimpin. Setelah itu orang-orang mencobalah mendaftar lagi ke S2 lumayanlah agak terpandang lama-lama setiap perguruan tinggi juga membuka S2 dan masih ada yang menganggur, jadi tidak lagi istimewa dan kekita jumlah mahasiswa makin besar gelombang deindustrialisasi terjadi. Kekita reformasi deindustrialisasi terjadi industri- industri manufaktur jatuh menjadi harapan kaum terdidik atau Intelegensia bisa masuk dunia industri pun terbatas harapan masuk kebirokrasipun, namun sementara menjadi wartawan pun media massa sudah tidak ada pembacanya, jadi kelompok ini jadi kemana dia mencari sandaran hidup kemudian membuat ruang publik gaduh ada disosmed yang menggambarkan hoax, kebencian, dan kebohongan apa lagi kemudian membuat kaum terdidik menjadi ajudan, jadi partai- partai politik namun itu sendiri belum tentu terpilih yang terpilih coba kita lihat bukan aktivis tapi bekas pengusaha, bekas artis, jadi aktivis ini ada pada suatu kegelisahan menjadi mahasiswa masuk pegawai negeri terbata

masuk diindustri-industi perlu koleks, masuk kepolitik perlu modal besar, membuat mahasiswa sekarang mempengaruhi kalau dulu menjadi mahasiswa merasa punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sekarang mana ada yang memperjuangkan masyarakat memperjuangkan dirinya sendiri saja susah untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa bekerja, agar tidak menjadi pengangguran”³⁹

Itulah yang menjadi pemikiran mahasiswa sekarang maka kampus-kampus yang dulunya menjadi sumber keberlawanan sekarang semuanya mati, karena mereka lebih pragmatis jadi hidup mahasiswa sekarang paling mereka habiskan di gadget, sosial media, whatsapp, sekali-kali kalau di sewa oleh politisi iya akan berpihak pada penyewanya jadi tidak ada lagi agenda kolektif sekarang Intelegensia itu, padahal dahulu Intelegensia itu bukan karena kesamaan pendidikan, kesamaan Identitas, tapi ada juga kesamaan agenda bersama. Sekarang agenda bersamanya tidak ada maka karena agenda bersama tidak ada kelompok Intelegensianya tidak bisa menyatukan diri yang ada hanya menjadi kaki tangan dari para pemodal atau dari politisi bermodal. Hilanglah agenda kolektif Intelegensia itu sekarang.

“Intelektual atau seorang cendekiawan memang harus terjun menjadi orang-orang yang berperan didalam lingkaran

kekuasaan, harus intelektual yang berperan untuk bergerak dalam lingkaran kekuasaan jangan sampai kita yang intelektual jauh belajar keluar kemudian datang menjadi pembawa tas makanya, Yudi Latif itu bilang kedepan itu tidak akan ada lagi teknokrat yang berada didalam lingkaran kekuasaan karena kaum ”teknokrat itu terkalahkan oleh orang: yang mempunyai modal” kaum yang menjadikan modal materinya itu untuk bisa menang dalam kontekstasi pemilu, sehingga orang-orang teknokrat ini intelektual, atau cendekiawan itu dia tidak punya lagi power untuk bisa menang dalam kontekstasi pemilu, karena itu yang dia ramalkan makanya dia mendorong orang-orang untuk bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan.”⁴⁰

Kaum teknokrat terkalahkan oleh kaum yang mempunyai modal, sehingga seorang intelektual tidak mempunyai lagi suatu power untuk dapat menang didalam suatu kontekstasi pemilu, karena itulah yang di ramalkan oleh pak Yudi, sehingga buku-buku yang beliau buat mendorong kaum intelektual untuk dapat masuk kedalam lingkaran kekuasaan.

“Yang sering diperbincangkan sebenarnya Yudi Latif dia itu tidak mau orang-orang cerdas orang-orang pintar larut dalam agenda-agenda politik yang syarat dengan kepentingan walaupun misal boleh masuk didalam kekuasaan tapi jangan kehilangan idealisme artinya dan itu

³⁹Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

⁴⁰Aswar Wijaya Zam, (Kabag Humas LP3I), wawancara di Makassar pada tanggal 08 Januari 2019.

secara praktis saya kira Yudi Latif sudah tunjukkan itu dia mundur dari jabatannya itu karena ada idealisme yang menurut dia tidak cocok lagi dengan kekuasaan hari ini kalau dia mau dibawa ke polarisasi dukungan yang tertentu dia tidak disitu dia memperjuangkan nilai, dia memperjuangkan pancasila sebagai kode etik bernegara tapi kalau dia dibawa kepada dukungan-dukkungan dia pasti tidak bisa. Makanya dia tinggalkan, menurut saya cendekiawan menurut dia begituu dia tidak memusuhi kekuasaan tapi dia juga tidak menjadi bagian yang membela kekuasaan itu dengan membabi buta".⁴¹

Hasil dari wawancara Yudi Latif tidak memusuhi kekuasaan namun dia juga tidak menjadi bagian yang membela kekuasaan. Nilai ini harus konstruktif jikalau pemimpin ini bagus didukung kalau tidak bagus silahkan dikritik. Cendekiawan harusnya berfungsi untuk menjadi sesuatu kekuatan transformasi yang dapat merubah keadaan yang baik menjadikannya jauh lebih baik lagi.

Mahasiswa seharusnya mengetahui dan memahami esensi sebagai mahasiswa karena jika mahasiswa tidak mengetahui dan memahami esensinya maka pasti mahasiswa tersebut hanya akan mengetahui kuliah dan tugas kuliah, hal

demikian tidaklah buruk melainkan hal tersebut malah baik karena memang selain kita diuntut untuk membentuk idealisme untuk kepentingan masyarakat kecil, juga kita harus berprestasi di bidang akademik. Sehingga terjadi keseimbangan antara mahasiswa secara umum (akademik) dan mahasiswa secara khusus (aktivis).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai cendekiawan dan kekuasaan perspektif yudilatif, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Yudi Latif Cendekiawan adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari kata Candakia (licik), atau ias juga diartikan sebagai candakiamana (betapa liciknya kamu). Candak berasal dari bahasa sansekerta yang dalam kurung waktu dari kata licik berubah menjadi cerdas. Cendekia, ini adalah suatu istilah lama yang diberi makna baru. Makna barunya bukan berarti seseorang yang berfikir cerdas tapi kecerdasannya itu ada kelicikan didalamnya. Dalam kurung waktu cendekiawan diberi makna sebagai kaum yang tercerahkan, cendekiawan ini tidak memiliki pemahaman yang pasti seperti intelektual dan intelegensia.

Kekuasaan atau power adalah suatu daya atau suatu kekuatan yang di pertukarkan untuk kehidupan manusia, tidak ada kehidupan tanpa power (kuasa). Power ini juga tidak selalu harus berkaitan dengan power politik dengan power Negara dalam hubungan kitapun berkembang suatu

⁴¹Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel divisi cendekiawan muda ICMI Sul-Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar pada tanggal 14 Februari 2019.

power yang saling mempengaruhi, atau mempunyai pengaruh.

Politik Indonesia hari ini lambat laun akan menghadirkan penjajahan baru karena kelak pemilik-pemilik modal itulah dimana kaum Intelektual yang akan menjadi pembawa atas dari kaum pemodal, orang lulusan perguruan tinggi luar Negeri ketika kembali ketanah air hanya akan menjadi bawahan dari pemodal. Jadi kata power dalam strategi permainan merdeka, permainan-permainan strategi diantara orang-orang merdeka. Kapan kita merdeka ? tentu saja jikalau daya kuasa terdistribusi pada banyak tempat tidak di konstelasi pada satu tangan saja, jadi politik Indonesia hari ini itu berbahaya.

Implikasi

Perkembangan Politik di Indonesia seharusnya dapat diterapkan dengan melihat pemikiran Yudif Latif tentang cendekiawan dan kekuasaan. Melihat perkembangan Kaum intelektual di Indonesia terjadi kemunduran karena para kaum intelektual sekarang ini banyak di manfaatkan dan digunakan sebagai alat oleh para kaum pemilik modal dalam mencapai tujuannya dimana yang seharusnya orang cendekiawan dan orang yang berkuasa memperbaiki demokrasi atau perpolitikan yang ada di Indonesia. Bukan hanya orang-orang yang memiliki modal yang dapat masuk dalam dunia politik, sebab semua orang mempunyai hak yang sama untuk berpolitik tanpa di lihat dari modal yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arianto, “Konsep Nasionalisme Dalam Pemikiran Yudi Latif: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila Notonagoro”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).
- Kabul Budiyono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung : ALFABETA, 2012).
- Michel Foucault, *Power/Knowledge Wacana kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, 2017).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Muhammad Saleh Tajuddin, “The Role of ICMI on The Development of Political Aspect: Study in the Beginning of Reformation Era”, *Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia (Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia)* (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Muslim Mufti, *Kekuatan Politik Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Mutiani, “Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia”, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2 2, (2015), h. 176-183.
- Nisa’ul Mauliddina, “Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Inodonesia (ICMI) Orwil Jawa

Timur Tahun 1991-2015”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Sukri, (Wakil Dekan 1 FISIP UNHAS), wawancara di UNHAS Makassar tanggal 13 Februari 2019.

Taufik Abdillah, “Peran Cendekiawan dalam Pengembangan Pendidikan Kritis di Indonesia (Studi Pemikiran Antonio Gramsci)” *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Yudi Latif, umur 54 tahun, (Tokoh Pemikir), wawancara di Mamuju tanggal 09 September 2018.

Internet

Umar Kamahi, *TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, (Kupang : Universitas Nusa Cendana, 2017).

Rustika Herlambang, “Yudi Latif” dalam <https://rustikaherlambang.com/2011/10/02/yudi-latif/> di akses pada tanggal 18/12/2018 pada pukul 20.08

Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kekuasaan “Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta:Democracy Project, 2012).

Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017).

Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. (Jakarta :Mizan, 2018).

Wawancara

Andi Luhur Priyanto, umur 36 tahun (Pengurus ICMI Sul-Sel divisi cendekiawan muda ICMI Sul-Sel, Pengurus MASIKA ICMI, dan Wakil dekan II FISIP UNISMU), wawancara di UNISMU Makassar pada tanggal 14 Februari 2019.

Aswar Wijaya Zam, (Kabag Humas LP3I), wawancara di Makassar pada tanggal 08 Januari 2019